

**PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROGRAM
MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :
MUHAMMAD RIZKI MA'RUF
NIM. 07011282025091**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROGRAM
MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

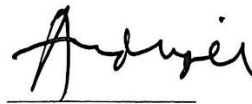
Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI MA'RUF
NIM. 07011282025091**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 9 Maret 2024

Pembimbing

**Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001**



Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROGRAM
MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2023

SKRIPSI

Oleh :

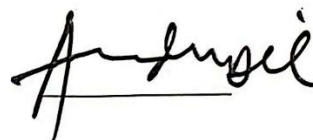
MUHAMMAD RIZKI MA'RUF
NIM. 07011282025091

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 27 Maret 2024

Pembimbing :

Tanda Tangan

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



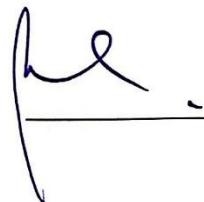
Penguji :

Tanda Tangan

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Junaidi, S.IP, M.Si
NIP. 197603092008021009



Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Ma'ruf

NIM : 07011282025091

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi Saya yang berjudul "Peranan Teknologi Informasi dalam Program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023" ini adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,
Indralaya 18 Maret 2024



Munammad Rizki Ma'ruf
NIM. 07011282025091

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya Drs. Husni Tamrin dan Agustina Pakpahan yang saya Cintai
2. Kepada Saudara-Saudari Saya yang Saya Sayangi
3. Teman-teman seperjuangan
4. Seluruh Dosen Administrasi Publik
5. Pegawai dan Staff Fisip Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Teknologi informasi sudah banyak digunakan di era sekarang, salah satunya di era pemerintahan. Khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengadopsi teknologi dalam pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan dari Teknologi informasi dalam proses pelaksanaan program Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari Persepsi yang Manfaat (*Perceived usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived ease of use*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Teknologi informasi dapat memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efektifitas pekerjaan anggota Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dalam menindak lanjuti hasil pengawasan secara eksternal dan internal melalui penggunaan aplikasi E AUDITEE dan SIWASIAT, meskipun terdapat beberapa hambatan didalamnya. Seperti permasalahan dimana update hasil pemantauan membutuhkan waktu yang lama, kendala dalam melakukan login pada aplikasi. Tetapi hal ini bukan menjadi kekurangan dari kinerja anggota Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Untuk kerjasama anggota Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan BPKP tidak adanya aplikasi khusus yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan, jadi kerjasama anggota Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan BPKP masih terkesan manual.

Kata Kunci : Peranan, Aplikasi, Teknologi Informasi, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budivanto, S.S.os., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Information technology has been widely used in the current era, one of which is in the government era. Especially in the Regional Inspectorate of South Sumatra Province which has adopted technology in work. This study aims to determine the role of information technology in the process of implementing the Monitoring program for follow-up on supervision results at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province in 2023. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The theory used in this study consists of Perceived usefulness and Perceived ease of use. The results showed that the role of information technology can facilitate work and increase the effectiveness of the work of members of Monitoring the follow-up of supervision results in following up the results of external and internal supervision through the use of the E AUDITEE and SIWASIAT applications, although there are several obstacles in it. Such as problems where updating monitoring results takes a long time, obstacles in logging in to the application. But this is not a shortcoming of the performance of members of the Monitoring of Follow-up of Supervision Results. For the cooperation of members of the Monitoring of Follow-up of Supervision Results with BPKP, there is no special application made to facilitate work, so the cooperation of members of the Monitoring of Follow-up of Supervision Results with BPKP is still manual.

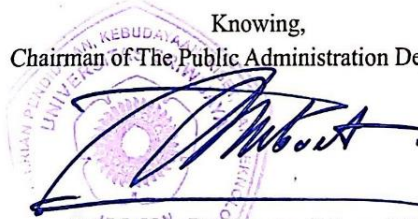
Keyword : *Role, Application, Information Technology, Monitoring Follow-up of Monitoring Results*

Advisor,

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Knowing,
Chairman of The Public Administration Department



Dr. M. Nur Budiyanto, S.S.os., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah. SWT, karena telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat membuat laporan skripsi dengan judul “Peranan Teknologi Informasi Dalam Program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023”. Sholawat serta salam dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Laporan skripsi ini dibuat sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyelesaian laporan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dorongan, semangat, motivasi, dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama pembuatan laporan sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Husni Tamrin dan Agustina Pakpahan yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Adi Baladika, S.H. sebagai Pembimbing Teknis di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Bapak Zulkarnain, S.E., M.M. selaku Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Bapak Andri Wijaya selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Teman-teman : Dela Aprilia, Arna Anida, Febi Melati, Wendi Kurniawan, Wulan Rahmadini, Liana Jantri, Bella Okta, dan Nike Indah Sari
9. Bapak dan Ibu Pegawai di ruangan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan. Penulis sadar akan adanya masih banyaknya ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan skripsi ini. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisan, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 18 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Rizki Ma'ruf', written in a cursive style.

Muhammad Rizki Ma'ruf
NIM. 07011282025091

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Peranan	9
2.2.1 Peranan Teknologi informasi	10
2.2.2 Peranan Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan	11
2.3 Teknologi Informasi	12
2.3.1 Fungsi Teknologi Informasi.....	13
2.4 Administrasi Pembangunan Dan Pengawasan Pembangunan Dalam Program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	15
2.4.1 Kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Sumsel	16
2.5 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	17
2.6 Teori Teknologi Informasi Menurut Para Ahli	21

2.7 Teori yang digunakan Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis 1989	28
2.8 Kerangka Teori	31
2.9 Kerangka Pemikiran	33
2.10 Hipotesis Deskriptif.....	35
2.11 Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Desain Penelitian.....	44
3.2 Definisi Konsep.....	44
3.3 Fokus Penelitian	46
3.4 Unit Analisis dan Unit Observasi	48
3.5 Informan Penelitian	48
3.5.1 Kriteria Informan	49
3.5.2 Key Informan.....	49
3.6 Data dan Sumber Data.....	49
3.6.1 Data.....	49
3.6.2 Sumber Data	50
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	51
3.9 Teknik Analisis Data.....	52
3.10 Sistematika Penulisan.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	56
4.1.1 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	56
4.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	61
4.1.3 Struktur Organisasi	62
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	64
4.3 Hasil Penelitian.....	65
4.4 Persepsi Yang Manfaat	65
4.4.1 Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah (<i>Makes Job Easier</i>).....	65
4.4.2 Bermanfaat (<i>usefull</i>)	69
4.4.3 Mempertinggi efektifitas (<i>enchance efectiveness</i>).....	72

4.5 Persepsi Kemudahan Penggunaan (<i>Perceived ease of use</i>).....	76
4.5.1 Komputer sangat mudah dipelajari	76
4.5.2 Keterampilan pengguna bertambah dengan menggunakan komputer	80
4.5.3 Komputer sangat mudah untuk dioperasikan.....	84
BAB V KESIMPULAN.....	90
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	3
Tabel 2 Alasan Pemilihan Judul	6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 4 Fokus Penelitian	46
Tabel 5 Susunan Pegawai Inspektorat.....	63
Tabel 6 Daftar Nama Inspektur	63
Tabel 7 Deskripsi informan penelitian	64
Tabel 8 Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah	66
Tabel 9 Bermanfaat (Usefull).....	70
Tabel 10 Mempertinggi efektifitas (Enhance Effectiveness)	73
Tabel 11 Komputer Sangat Mudah Dipelajari.....	77
Tabel 12 Keterampilan Pengguna Bertambah Dengan Menggunakan Komputer	81
Tabel 13 Komputer Sangat Mudah Untuk Dioperasikan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial	5
Gambar 2 Standar Operasional Prosedur	20
Gambar 3 Menu aplikasi E AUDITEE.....	75
Gambar 4 Menu Pada Aplikasi SIWASIAT	78
Gambar 5 Undangan diklat pelatihan aplikasi SIWASIAT	82

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
<i>Good Governance</i>	: Pemerintah Yang Baik
Kasubbag	: Kepala Subbagian
LHP	: Laporan Hasil Pengawasan
SIWASIAT	: Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat
TLHP	: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
TI	: Teknologi Informasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Soerjono Soekanto (2002), Peranan merupakan dimensi dinamis dari kedudukan (status) seseorang, yang termanifestasi ketika individu menjalankan hak dan kewajibannya. Peranan, dalam konteks yang lebih luas, merujuk pada fungsi, tanggung jawab, atau tugas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem atau lingkungan khusus. Peranan ini dapat ditentukan oleh norma sosial, kebijakan organisasi, atau ekspektasi masyarakat. Contoh dari peranan ini dapat mencakup peranan manajerial, peranan pekerja, dan peranan teknologi informasi.

Peranan teknologi informasi memiliki hubungan yang saling terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai konteks. Teknologi informasi memegang peran penting dalam memberdayakan individu dan organisasi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas, peranan individu atau kelompok dapat dijalankan dengan lebih efisien dan produktif.

Khususnya di sektor publik, yaitu Organisasi perangkat daerah (OPD) salah satu tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat, teknologi informasi berperan dalam memudahkan pekerjaan pegawai dalam menginput data dan meningkatkan efektivitas pegawai dalam menjalankan tugasnya. Menurut Martin (1999), teknologi informasi tidak hanya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga meliputi teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Di sisi lain, menurut Lucas

(2000), teknologi informasi mencakup berbagai jenis teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi secara elektronik. Contoh-contoh teknologi informasi termasuk komputer mikro, komputer utama, pembaca kode batang, perangkat lunak untuk pemrosesan transaksi, spreadsheet digital, serta peralatan dan jaringan komunikasi.

Di era modern saat ini, teknologi informasi telah berpengaruh ke seluruh sektor, termasuk sektor-sektor publik. Salah satu Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai sektor publik yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu instansi bidang pengawasan pemerintah di Sumatera Selatan yang secara langsung bergerak di bawah Gubernur. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 7 ayat 1 huruf j yaitu menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Pengawas Ekstern. Program ini didedikasikan untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Organisasi Perangkat Daerah lain sebagai target dari program ini yang tercantum di dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran teknologi informasi saat ini sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor publik seperti Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Teknologi informasi berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah pelaksanaan tugas. Selain itu, teknologi informasi juga menjadi sarana komunikasi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti dalam program monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam program ini, teknologi informasi digunakan untuk menganalisis data dari hasil laporan hasil pemeriksaan

(LHP), serta sebagai sarana untuk mengirimkan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang menjadi target dari program tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan terdapat 715 temuan pemeriksaan dengan 1.872 rekomendasi, telah selesai ditindak lanjuti atau tuntas sebanyak 1.467 rekomendasi atau 78,36 %. Secara lengkap hasil tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Tahun Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil		
	Jumlah	Jumlah	Sesuai	Belum Selesai	Belum Ditindak lanjuti	Tidak dapat ditindak lanjuti
Tahun 2005	18	29	21	8	0	0
Tahun 2006	29	79	63	15	1	0
Tahun 2007	26	55	41	13	0	1
Tahun 2008	56	137	125	12	0	0
Tahun 2009	46	88	78	10	0	0
Tahun 2010	47	108	95	12	1	0
Tahun 2011	67	169	162	6	1	0
Tahun 2012	82	210	195	15	0	0
Tahun 2013	42	119	112	7	0	0
Tahun 2014	23	75	67	8	0	0
Tahun 2015	66	174	135	36	2	1
Tahun 2016	41	117	78	35	4	0
Tahun 2017	38	100	72	28	0	0
Tahun 2018	34	100	80	17	3	0
Tahun 2019	24	83	51	28	4	0
Tahun 2020	44	107	53	53	1	0
Tahun 2021	34	122	39	37	46	0
Jumlah	715	1872	1467	340	63	2

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Meskipun pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK dapat berjalan sesuai keinginan hingga rekomendasi yang diinginkan dapat terlaksana, tetapi di dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu salah satunya lambat nya proses pemenuhan dokumen-dokumen dari OPD saat dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, bahkan tidak dapatnya tepenuhi dokumen tersebut hingga akhir tahun.

Merujuk dari uraian di atas, untuk itu penulis membuat pembahasan baru untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan program monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yang disertain data pendukung dari permasalahan tersebut serta alasannya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Lambat nya proses pemenuhan dokumen-dokumen dari OPD saat dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, bahkan tidak dapatnya tepenuhi dokumen tersebut hingga akhir tahun.
2. Tidak adanya kualifikasi khusus dalam pemilihan anggota program TLHP.

Dari kedua alasan tersebut akan di uraikan seperti di bawah ini :

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi dari Auditor yang melakukan pengawasan awal, Auditor akan menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), setelah dilakukan telaah data oleh *implementor* program TLHP, barulah dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OPD sebagai target dari rekomendasi yang ada di LHP. Berikut merupakan contoh hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan :

Gambar 1 Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ptl. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 Dari : Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumsel
 Tanggal : Februari 2023
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022

2. DASAR

3. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00042/ST/ITDAPROV.VI.1/2023 tanggal 25 Januari 2023 untuk Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

4. Laporan Hasil Audit Ketepatan Perjalanan Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/228/ITDAPROV.II/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan pemantauan dalam rangka memperoleh dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

5. HASIL

Tim telah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Terhadap 11 (sebelas) temuan dan 20 (dua puluh) Rekomendasi telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status	Kat
1.	1) belum menyusun dan melaksanakan kebijakan kode etik / aturan perilaku yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi Aparatur Sipil Negara	Diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan memantapkan secara tertulis kepada Kepala Sub bagian Umum dan Kependidikan awal:	ditampar surat kepada dinas sosial kepada kepala sub bagian umum dan kependidikan dinas sosial provinsi sumatera selatan nomor 010/MH/16/Nov2023 tanggal 01 Januari 2023 perihal surat perintah agar menyusun kebijakan kode etik/aturan perilaku yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi dan menyusun jeda diklat Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing dan mengorganisir kegiatan diklat tersebut pada Tahun 2023	(1) Dalam Proses (2) Dalam Proses	
	2) belum terdapat pelatihan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan job description masing-masing pegawai	2.Menyusun peta diklat Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing dan mengorganisir kegiatan diklat tersebut pada Tahun 2023			

4) Memberikan teguran tertulis kepada Pejabat Pembastutan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pembastutan Keuangan / Tim Verifikasi SAPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan APRO Tahun 2022 untuk melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugasnya.

5) Memberikan teguran secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran untuk meneliti dan menguji kebenaran atas dikurir pertanggungjawaban.

6) Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk mematuhi aturan tentang Belanja Perjalanan Dinas

yang menggunakan kupon BBM dan pengahannya di sub kegiatan jasa perjalanan dinas di bulan tidak terdapat pengisian BBM diumumkan SPBU tidak menginformasikan ke BSM Dalam hal pengisian perjalanan dinas SPBU menginformasikan ke BSM tidak melebihi aturan biaya umum diumumkan tidak memuat foto tersebut dengan kegiatan pelaksanaan SPBU

belanja transportasi parkir, jelajah upacara remung sus HUT RI 77 tahun berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumel nomor 226/KPTS/SP/KA/2022 yang tidak menyajikan anggaran biaya transportasi yang tidak menyajikan anggaran biaya transportasi yang mana pelaksanaan SOP melalui PPKK menggunakan LPJ berisikan Keputusan Gubernur Sumel Nomor 226/KPTS/SP/KA/2022 1 pada lampiran I dari perjalanan tersebut dinas sosial tidak beres/keberatan untuk mendakikan/temuan tersebut

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Hasil dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya dari 20 rekomendasi yang tercantum di LHP terdapat 9 rekomendasi yang belum dipersiapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai OPD dan target dari program ini tidak bisa memenuhi keseluruhan kewajibannya untuk mempersiapkan data-data dan berkas yang diperlukan dalam proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara lengkap.

Dalam pelaksanaan Program monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, tidak adanya kualifikasi khusus dalam pemilihan anggota program ini, anggota program ini adalah seluruh pegawai pada sub bagian Perancangan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tetapi terdapat peraturan yang mengatur program Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 7 ayat 1 huruf j yaitu menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Pengawas Ekstern. Tidak adanya kualifikasi khusus dalam pemilihan anggota program dapat berdampak pada kurangnya kesesuaian antara keahlian dan tugas yang di emban oleh anggota program, hal ini akan meningkatkan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan program Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 2 Alasan Pemilihan Judul

No	Bentuk keadaan	Keterangan
1	Saat dilakukan Tindak lanjut hasil pemeriksaan ke OPD dari rekomendasi LHP.	Lambat nya proses pemenuhan dokumen-dokumen dari OPD saat dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, bahkan tidak dapatnya tepenuhi dokumen tersebut hingga akhir tahun.
2.	Tidak dibuat kualifikasi khusus	Tidak dibuatnya kualifikasi khusus dalam pemilihan anggota pada program ini.

Sumber : data diolah oleh penulis 2023

Dengan merujuk pada alasan di atas peneliti ingin melihat apakah peranan dari Teknologi Informasi dapat membantu dan mempermudah anggota monitoring tindak

lanjut hasil pengawasan dalam mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaannya, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Teknologi Informasi Dalam Program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peranan teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan dalam proses pelaksanaan secara internal dan eksternal dalam program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023?
2. Apa saja faktor-faktor di dalam teknologi informasi yang berperan dalam proses pelaksanaan secara internal dan eksternal dalam program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan dalam proses pelaksanaan secara internal dan eksternal dalam program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor di dalam teknologi informasi yang berperan dalam proses pelaksanaan secara internal dan eksternal dalam

program Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam Peranan Teknologi Informasi dalam keberlangsungan Program monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan pemerintah khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam bidang Teknologi informasi dan pengawasan yaitu Peranan teknologi informasi dalam program Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, selaku pihak yang bertugas sebagai pengelolaan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim and S. Z. Harahap, "PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI," 2021. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/348805601>
- A. Taufik, S. Kom, M. Bernadus Gunawan Sudarsono, and M. Kom, *Pengantar Teknologi Informasi*.
- A. Heny and M. Nurdin, "MENUJU PEMERINTAHAN TERBUKA (OPEN GOVERNMENT) MELALUI PENERAPAN E GOVERNMENT."
- A. Barkah, T. Mardiana, and M. Japar, "ANALISIS IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA MATA PELAJARAN PKN," *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, vol. 7, no. 2, Nov. 2020, doi: 10.25134/pedagogi.v7i2.3426.
- A. Furqani and F. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja, "Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep)", [Online]. Available: <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- A. O. Rondonuwu *et al.*, "ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA."
- B. Hadi, B. H. Purnomo, and M. R. Ridlo, "Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Studi Kasus Inspektorat PPAJK."
- B. Santoso, E. Zusrony, K. Satya Wacana, A. Program Magister Sistem Informasi, and U. Kristen Satya Wacana, "ANALISIS PERSEPSI PENGGUNA APLIKASI PAYMENT BERBASIS FINTECH MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)." [Online]. Available: www.cnbcindonesia.com
- F. Fahza AlFaizi, Y. Airohmah, and B. Fatwa Anbiya, "ANALISIS KONSEP, TEORI TEKNOLOGI INFORMASI DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PAI DI INDONESIA." [Online]. Available: <https://www.google.com>

- J. L. Banjar Nahor, A. Adriani, and W. Nor, "ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK PADA PEMERIKSAAN KINERJA ATAS KEGIATAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO TIMUR," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 1, p. 1, Mar. 2021, doi: 10.29103/jak.v9i1.3447.
- J. Sains, D. Teknologi, A. Hanif, M. Giatman, and A. Hadi, "EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5".
- M. Zainal, H. Sekolah, T. Agama, I. Darul, and U. B. Pamekasanuniversitas, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan)," 2022.
- M. Desy Ria and A. Budiman, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERPUSTAKAAN," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*, vol. 2, no. 1, pp. 122–133, 2021, [Online]. Available: <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>
- N. Edwin Kiky Aprianto, "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis," *International Journal Administration, Business and Organization (IJABO)* |, vol. 2, no. 1, pp. 1–7, 2021, [Online]. Available: <https://ijabo.a3i.or.id>
- R. Handayani, R. F. Runtuwene, S. A. P. Sambul, J. Ilmu, A. Program, and S. A. Bisnis, "Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Telkom Indonesia Cabang Manado," 2018.
- R. Ramadhan Pongoliu, D. Saerang, H. Manossoh, P. Magister Akutansi, and F. Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, "Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo."
- S. Hajrah *et al.*, "Peran Informasi Teknologi (IT) Dalam Manajemen Kurikulum, Pembelajaran Dan Kepesertadidikan," 2023.

- S. SUDRAJAT, “PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG,” 2024.
- T. Kurniawan and B. Wijarnako, “Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam menumbuhkan motivasi kewirausahaan pada siswa kelas VII SMP N 1 Kalikajar,” *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, Jul. 2023, doi: 10.37729/jpse.v9i1.2790.